



## Peran Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik

Tengku Darmansah<sup>1\*</sup>, Anggi Anggraini<sup>2</sup>, Fauzan Azhima Sirait<sup>3</sup>, Nurkhotima<sup>4</sup>, Wardah Sahrani Sibarani<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: [tengkudarmansah@uinsu.ac.id](mailto:tengkudarmansah@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [anggrainianggi46937@gmail.com](mailto:anggrainianggi46937@gmail.com)<sup>2</sup>, [pojanejima729@gmail.com](mailto:pojanejima729@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nurkhotima1510@gmail.com](mailto:nurkhotima1510@gmail.com)<sup>4</sup>, [wardahsahrani@gmail.com](mailto:wardahsahrani@gmail.com)<sup>5</sup>

\*Korespondensi penulis: [tengkudarmansah@uinsu.ac.id](mailto:tengkudarmansah@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *Education policy functions as a framework that sets educational standards and goals, so as to ensure that all students have equal access to resources and learning opportunities. Through the development of relevant curricula and quality teacher training, education policies can improve teacher competency, which in turn has a positive impact on student learning outcomes. In addition, educational policies also include systematic monitoring and evaluation to identify areas of improvement, thereby enabling the necessary adjustment strategies to meet students' needs more effectively. This research aims to determine the role of change management in order to determine the role of educational policy in improving the quality of education for students. In this research, qualitative methods were used through literature. Well-designed education policies can improve access to education for all students. Education policy also plays an important role in improving the quality of teaching through continuous training for teachers. Participation of parents and communities in supporting educational policies.*

**Keywords:** *Policy, Education, Role, Participation.*

**Abstrak.** Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai kerangka kerja yang menetapkan standar dan tujuan pendidikan, sehingga dapat memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan belajar. Melalui pengembangan kurikulum yang relevan dan pelatihan guru yang berkualitas, kebijakan pendidikan dapat meningkatkan kompetensi pengajar, yang pada gilirannya berdampak positif pada hasil belajar siswa. Selain itu, kebijakan pendidikan juga mencakup pengawasan dan evaluasi sistematis untuk mengidentifikasi perbaikan area, sehingga memungkinkan strategi penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran manajemen perubahan guna untuk mengetahui peran kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa. Pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif melalui kepustakaan. Kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan akses pendidikan bagi semua peserta didik. Kebijakan pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru. Partisipasi orang tua dan komunitas dalam mendukung kebijakan pendidikan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan, Peran, Partisipasi.

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya berpengaruh pada kemampuan individu, tetapi juga berdampak langsung pada perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek, kurikulum, metode pengajaran, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Kebijakan yang telah dibuat melalui tahapan-tahapan diantaranya pembuatan suatu kebijakan, berawal dari perencanaan, agenda kebijakan, latar belakang sebuah kebijakan dibuat, dan dilanjutkan pengesahan lalu ke tahap pelaksanaan atau implementasi, dan berakhir dengan penilaian. Dalam kehidupan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa, sebab pendidikan merupakan tolok ukur yang akan membawa manusia kearah masa depan. Dengan adanya pendidikan itu sendiri kita dapat mengetahui kepentingan dalam perkembangan pada diri manusia yang meliputi tingkah laku, sifat, sikap, watak, yang semua itu akan sangat mempengaruhi dan berdampak pada diri manusia, serta bangsa dan Negara.

Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan orang tua. Melalui kebijakan yang tepat dan efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung perkembangan potensi setiap peserta didik. Kebijakan ini juga harus responsif terhadap kebutuhan zaman dan tantangan globalisasi yang terus berkembang.

Kebijakan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Melalui kebijakan yang efektif, pemerintah memastikan akses pendidikan yang merata, meningkatkan kompetensi guru, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Kebijakan juga mencakup kurikulum pengembangan yang relevan dan inklusif, serta pengawasan dan evaluasi sistem pendidikan untuk menjamin penerapan yang efektif. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan mendukung perkembangan karakter siswa.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa strategi, seperti peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, revisi kriteria agar relevan dengan kebutuhan industri dan informasi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. “Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati Problem dan mencari jawaban” (Mulyana, 2008: 145). Dalam penulisan ini, penulis klasifikasikan sebagai penulisan lapangan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulisan deskriptif merupakan bentuk penulisan yang paling dasar. Ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia Dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah teknik Studi Literatur atau yang biasanya kita kenal dengan studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data sekunder yang paling populer.

Studi kepustakaan juga dilakukan dengan metode tinjauan pustaka yang pengumpulan materi-materinya dari artikel-artikel yang dijadikan sebagai referensi-referensi yang relevan dengan penelitian atau riset. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan (policy) sering diartikan secara etimologi yaitu polis yang artinya kota (city), kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah atau suatu Lembaga. Abidin menjelaskan kebijakan adalah “keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.”

Pendidikan adalah sebuah kata yang menjadi acuan masyarakat untuk menyebut intelektualitas seseorang. Maka dengan semakin tinggi Pendidikan seseorang, maka akan dengan mudah mendapatkan suatu pekerjaan. Namun, kesuksesan seseorang juga harus dibarengi dengan skill dan kemauan tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membuat suatu bangsa menjadi disegani oleh bangsa lainnya, dan lewat pendidikan lah semua dapat dicapai (M Teguh Saefuddin, 2024).

Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan

melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Komponen kebijakan pendidikan terdiri dari lima yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Karakteristik kebijakan pendidikan yaitu memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal-formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, dievaluasi dan memiliki sistematika. Pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan terdiri dari pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan manajerial, pendekatan perilaku dan pendekatan politik (Farkhan et al., 2022).

Kebijakan pendidikan adalah suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem pendidikan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah.

Kebijakan pendidikan mempunyai sifat yang strategis yang terkait dengan politik, meskipun banyak pihak yang menangkan serta memahami pendidikan harus bebas dari politik. Salah satunya tujuan, nilai-nilai, arah, dan dana pendidikan. Jadi pendidikan nasional semuanya diatur dalam kesepakatan politik. Begitupun realitanya, masih banyak ditemui proses rasional analisis kebijakan pendidikan yang melibatkan politik dan tidak dapat dipisahkan. Proses politik menjadi salahsatu bentuk rasioanal karena proses politik masih ada orientasi hubungan dengan kepentingan masyarakat (Anesti & Wardani, 2022).

### **Peran Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan proses dan strategi pendidikan. Melalui penetapan visi, standar pendidikan, alokasi sumber daya, dan strategi pembelajaran, kebijakan menjadi landasan utama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam proses ini, kebijakan menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas, inklusi, dan realisasi.

Kebijakan pendidikan yang berkualitas harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan tantangan di seluruh dunia. Selain itu, kebijakan harus mendorong kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting untuk menghasilkan generasi yang inovatif, cerdas, dan siap menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis. Hasilnya adalah bahwa investasi dan komitmen terhadap

pembangunan Kebijakan pendidikan yang holistik dan progresif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses dan strategi pendidikan terus berkembang.

Penyelenggara pendidikan harus dapat memahami keinginan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan global, latar belakang kebijakan pendidikan harus mencerminkan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini. Kebijakan pendidikan yang solid dapat menjadi landasan untuk transformasi yang positif dalam sistem pendidikan negara. Pendidikan diharapkan dapat benar-benar membantu masyarakat baik di tingkat pusat maupun di daerah. Agar penyelenggara pendidikan dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan tentang perluasan, diperlukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pendidikan (Hayadi et al., 2023).

Kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Di Indonesia, pemerintah sebagai pemangku kebijakan utama bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas.

Kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif dan program, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan:

1) Penyediaan Akses Pendidikan yang Merata

Program seperti Wajib Belajar 9 Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirancang untuk meningkatkan partisipasi siswa, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. BOS memberikan dana langsung kepada sekolah untuk meringankan biaya pendidikan, sehingga mengurangi beban finansial orang tua

2) Peningkatan Kompetensi Guru

Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi guru. Kebijakan publik sering kali berfokus pada pelatihan dan pengembangan profesional guru melalui program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru dan kesejahteraan mereka, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.

3) Pengembangan Kurikulum yang Inklusif dan Relevan

Kebijakan pendidikan juga mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

4) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan adalah aspek penting dari kebijakan pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk membangun dan merehabilitasi sekolah-sekolah, menyediakan ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi dan air bersih. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

5) Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan

Kebijakan publik juga mencakup sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga. Pemerintah melakukan monitoring rutin terhadap kinerja sekolah dan implementasi kurikulum melalui lembaga seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Data yang diperoleh digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik di lapangan (Yulia & Suryani, 2022).

### **Dampak Kebijakan Pendidikan Terhadap Peserta Didik**

Kebijakan pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap peserta didik, baik secara positif maupun negatif. Dalam konteks perubahan kurikulum di Indonesia, dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk proses pembelajaran, motivasi belajar, dan hasil akademis.

Perubahan kurikulum sering kali mempengaruhi cara pengajaran di kelas. Ketika kurikulum baru diterapkan, guru perlu beradaptasi dengan metode dan materi ajar yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi peserta didik yang terbiasa dengan pendekatan sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa transisi ke kurikulum baru dapat mengganggu ritme belajar siswa, terutama jika mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari guru atau sekolah.

Pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa kurikulum. Menurut Insani bahwa kurikulum menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Sederhananya, kurikulum menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Dikatakan demikian, karena kurikulum menjadi dasar pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Sudah barang tentu, tidak ada proses pembelajaran tanpa kurikulum. Mau ke mana arah pendidikan di Indonesia jika kurikulum tidak ada. Kurikulum yang baru yang akan dilaksanakan, telah didesain dengan menelaah lebih

lanjut apa saja yang menjadi kendala pada kurikulum sebelumnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan perubahan kurikulum adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya.

Begitu pentingnya kurikulum dalam bidang pendidikan karena menjadi alat, rujukan, dasar atau pandangan hidup seperti yang telah dijelaskan di atas. Menurut Nasution sebagaimana dikutip bahwa kurikulum senantiasa diperbaharui namun tentu penyempurnaan kurikulum tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah mengimbangi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu masif dalam bidang pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka kurikulum harus terus disempurnakan. Baik dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (MASKUR, 2023).

Kebijakan pendidikan yang berubah juga dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Jika siswa merasa bahwa kurikulum baru lebih menarik dan relevan dengan kehidupan mereka, hal ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Sebaliknya, jika siswa merasa kesulitan untuk memahami materi baru atau merasa tidak ada hubungan antara pelajaran dan kehidupan sehari-hari mereka, motivasi belajar bisa menurun.

Dampak kebijakan pendidikan terhadap hasil akademis peserta didik sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kurikulum dapat berdampak pada pencapaian akademis siswa dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Siswa mungkin mengalami penurunan nilai sementara saat beradaptasi dengan sistem baru; namun, jika implementasi dilakukan dengan baik dan dukungan diberikan secara konsisten, hasil akademis mereka bisa meningkat seiring waktu.

Selain dampak akademis, kebijakan pendidikan juga mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial peserta didik. Perubahan dalam lingkungan belajar dapat menciptakan stres bagi siswa yang harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi baru dari guru dan sistem pendidikan. Dukungan sosial dari teman sebaya dan guru sangat penting dalam membantu siswa menghadapi tantangan ini.

Dampak kebijakan pendidikan terhadap peserta didik sangat kompleks dan multifaset. Untuk meminimalkan efek negatif dari perubahan kurikulum, penting bagi pihak sekolah untuk menyediakan pelatihan bagi guru serta dukungan tambahan bagi siswa selama masa transisi (Solehudin, 2023).

#### 4. SIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Komponen kebijakan pendidikan terdiri dari lima yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak.

Investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan adalah aspek penting dari kebijakan pendidikan. Kebijakan publik juga mencakup sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga. Kebijakan pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap peserta didik, baik secara positif maupun negatif. Pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa kurikulum.

Sederhananya, kurikulum menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Mau ke mana arah pendidikan di Indonesia jika kurikulum tidak ada. Begitu pentingnya kurikulum dalam bidang pendidikan karena menjadi alat, rujukan, dasar atau pandangan hidup seperti yang telah dijelaskan di atas. Perubahan dalam lingkungan belajar dapat menciptakan stres bagi siswa yang harus menyesuaikan dengan ekspektasi baru dari guru dan sistem pendidikan. Dampak kebijakan pendidikan terhadap peserta didik sangat kompleks dan multifaset.

#### REFERENSI

- Alamsyah, N., & Safitri, T. (2021). Analisis implementasi kebijakan pendidikan karakter di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(2), 114–121.
- Anesti, O., & Wardani, R. (2022). Moh Rifki, Nazhif Nafi' Dinulloh, Indo Ahya Maulana, Nur'Aini Zahro. *Universitas Ahmad Dahlan*, 1(3), 91–93.
- Arsyad, A., & Malik, H. (2022). Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 5(3), 200–210. <https://doi.org/10.31004/jipi.v5i3.1234>
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Hakim, A., & Rofiq, M. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan Islam di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam Modern*, 3(2), 145–155.
- Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., & Rohim, R. (2023). Kebijakan dan strategi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1439–1448.



- Indriani, S., & Kusumawati, A. (2021). Pengaruh kebijakan pendidikan inklusif terhadap prestasi siswa berkebutuhan khusus. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 8(1), 22–30.
- M Teguh Saefuddin, D. (2024). Kebijakan pendidikan dalam peningkatan kualitas sekolah dasar tahun 2020–2025.
- MASKUR, M. (2023). Dampak pergantian kurikulum pendidikan terhadap peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 1(3), 190–203. <https://doi.org/10.61116/jkip.v1i3.172>
- Nasution, R., & Abdullah, A. (2023). Dinamika kebijakan pendidikan nasional dalam menghadapi tantangan global. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 7(4), 332–340.
- Pratama, R., & Rahmatullah, D. (2022). Transformasi kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(1), 50–60.
- Rahmawati, E. N., & Sari, M. (2023). Implementasi kebijakan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah menengah. *Jurnal Teknologi dan Pembelajaran Sekolah*, 6(2), 115–125.
- Solehudin, S. (2023). Tantangan dunia pendidikan Islam dan implikasinya terhadap perubahan kebijakan. *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 5(2), 130–140. <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v5i2.308>
- Yulia, L., & Suryani, Z. (2022). Korelasi pedagogik dan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan*, 6(1), 881–889.
- Yusuf, A., & Wibowo, T. (2022). Kebijakan pendidikan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja profesional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Vokasi*, 3(1), 25–35.